

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan

Azizatul Kamaliyah Suwandi ¹⁾, Eny Haryati ²⁾, Suroso ³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: kamaliyahazizatul@gmail.com

ABSTRAK

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang amat penting terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi dan pemertaan hasil-hasil pembangunan. Evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata adalah kegiatan yang berguna untuk mengidentifikasi masalah, kondisi, dan faktor pengembangan pariwisata yang diterapkan oleh pemerintah. Segala upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengembangan agar jumlah wisatawan terus meningkat, tetapi masih belum ada peningkatan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan destinasi wisata peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan wisatawan. Melalui pendekatan kualitas, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor besarnya anggaran yang diberikan, tingkat kunjungan wisatawan, seberapa besar pengembangan, dan pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum bisa dikatakan maksimal dan belum mendukung dalam pengembangan wisata sehingga belum ada pencapaian kebijakan. Dampak dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto, yaitu berkurangnya wisatawan untuk mengunjungi wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto khususnya wisata peninggalan Kerajaan Majapahit. Dampak ini juga dirasa pada anggaran yang masuk ke APD Kabupaten Mojokerto yang semakin berkurang. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang permasalahan kebijakan pengembangan destinasi wisata yang berada di Kabupaten Mojokerto yang khususnya di wisata peninggalan Kerajaan Majapahit. Dengan mengidentifikasi faktor penyebab dan dampak yang dihasilkan, penelitian ini memberikan dasar untuk evaluasi kebijakan yang lebih efektif dalam menangani isu kompleks ini. Diharapkan bahwa dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pengembangan destinasi wisata, pemerintah bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kembali wisatawan pada destinasi wisatawan di wisata sejarah Kerajaan Majapahit.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pengembangan, Pariwisata

Abstract

Tourism is a very important development sector, especially in the context of community empowerment for economic growth and equitable distribution of development results. Evaluation of tourism development policies is a useful activity for identifying problems, conditions and tourism development factors implemented by the government. Every effort has been made to overcome development problems so that the number of tourists continues to increase, but there is still no significant increase. This research aims to evaluate policies for developing tourist destinations from the Majapahit Kingdom in Mojokerto Regency to increase tourists. Through a quality approach, this research identifies factors regarding the size of the budget provided, the level of tourist visits, the extent of development and implementation of policies. The results of the analysis show that the policies implemented by the Mojokerto Regency Government cannot be said to be optimal and have not supported tourism development so that there has been no policy achievement. The impact of the policy made by the Mojokerto Regency government is the reduction in tourists visiting tourism in Mojokerto Regency, especially the heritage tourism of the Majapahit Kingdom. This impact is also felt in the budget that goes to Mojokerto Regency's PPE which is increasingly decreasing. This research provides an in-depth understanding of policy issues for developing tourist destinations in Mojokerto Regency, especially in heritage tourism from the Majapahit Kingdom. By identifying causal factors and resulting impacts, this research provides a basis for more effective policy evaluation in addressing this complex issue. It is hoped that with a better understanding of tourist destination development policies, the government can work together with the surrounding community

to increase the return of tourists to tourist destinations in the historical tourist destinations of the Majapahit Kingdom.

Keywords: Evaluation, Policy, Development, Tourism

A. LATAR BELAKANG

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang amat penting terutama dalam rangka pemberdayaan masyarakat pada pertumbuhan ekonomi dan pemertaan hasil-hasil pembangunan. Hal ini karena pertumbuhan sektor pariwisata memiliki efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) yang amat luas yang dapat dinikmati oleh banyak pihak termasuk masyarakat kelas bawah.

Perkembangan dunia pariwisata mulai mengalami perubahan dengan baik seperti, perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berfikir maupun sifat perkembangan itu sendiri. Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dan berusaha membangun industri pariwisata sebagai cara untuk mencapai neraca perdagangan luar negeri yang berimbang. Sektor pariwisata di Indonesia memiliki peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional.

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sejarah dan budaya yang menjadikan banyak jumlah warisan peninggalan sejarah dan budaya yang bermacam macam. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat strategis dan sangat cocok untuk dijadikan jalur perdagangan pada masa lampau. Karena kondisi tersebut, Indonesia memiliki warisan yang kaya akan sejarah akibat proses pembauran dari kebudayaan bangsa asing yang datang ke Indonesia.

Jawa Timur adalah provinsi memiliki kota/kabupaten yang berjumlah 38 yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota. Setiap daerah di Jawa Timur memiliki berbagai peninggalan purbakala dari zaman prasejarah, Hindu-Buddha, Islam dan kolonial. Balai Perlindungan Cagar Budaya (BPCB) Jawa Timur memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan perlindungan cagar budaya. Sudah sejak 1988 data peninggalan purbakala sudah sebanyak

11.155 cagar budaya yang terdiri dari benda bergerak, koleksi museum, bangunan infrastruktur, situs dan kawasan di wilayah Jawa Timur.

Di Trowulan juga ada peninggalan Kerajaan Majapahit yang berupa kolam, yaitu Kolam Segaran. Segaran berasal dari kata *segoro* yang berarti telaga buatan. Dalam buku Negara Kertagama telaga ini merupakan telaga yang multiguna. Menurut data pada Museum Trowulan, kolam Segaran ini dibuat pada abad ke-14 yang memiliki luas 375 meter x 125 meter dengan kedalaman 2,80 meter. Kalm ini dibuat menggunakan batu bata yang ditata sedemikian rupa tanpa adanya perekat dan hanya digosokan gosokan satu sama lain. Air yang ada di kolam berasal dari Balong Bunder dan Balong Dowo yang terletak di sebelah Selatan dan Barat Daya kolam, saluran air masuk ke dalam kolam yang berada di bagian Tenggara. Di sebelah Selatan sudut Timur Laut dinding sisi luar terdapat 2 kolam kecil yang berhimpitan dan di sebelah Barat sudut Timur terdapat saluran air yang menembus sisi Utara. Bagian Tenggara terdapat saluran air yang masuk pada kolam dan saluran air keluar di sebelah Barat Laut (Arnawa I. G. Bagus L, 2004:37-38).

Kolam ini adalah salah satu simbol kejayaan Kerajaan Majapahit. Beberapa ahli antropologi nasional mengakui kolam ini sebagai kolam kuno terbesar di Indonesia. Kolam Segaran ditemukan pada tahun 1926 oleh seseorang yang berasal dari Belanda, Ir. Henry Maclain Pont yang bekerjasama dengan Bupati Mojokerto pertama yaitu Kromojoyo. Telah dilakukan perbaikan beberapa kali pada tahun 1966, 1974, dan 1984.

Terdapat kisah mistis di keberadaan kolam ini yang pertama kali saat perbaikan pertama ditemukan bandul jaring, kail pancing yang berasal dari emas dan terdapat piring yang berbahan emas. Semua penemuan ini tersurat di dalam satu dinding Museum Trowulan. Banyak

cerita yang berkembang pada masyarakat bahwa kolam Segaran ini dulunya berfungsi sebagai tempat pemandian putri raja. Cerita lain juga datang dari China yang menyebutkan bahwa kolam ini sering digunakan Raja Majapahit untuk bercengkrama dengan permaisuri serta selir kedatonnya. Kolam ini sering digunakan Raja Hayam Wuruk untuk menjamu tamu agung dari Kerajaan Tiongkok. Pada saat perjamuan Raja Hayam Wuruk memamerkan kekayaan dengan dibuangnya peralatan pesta yang kotor ke dalam kolam. Dibangunnya Kolam Segaran memiliki fungsi utama yaitu sebagai penunjang perekonomian rakyat khususnya untuk para petani dan itu terbukti dari fungsinya sebagai waduk pengairan untuk sawah masyarakat.

Berikut jumlah data kunjungan wisata di Mojokerto:

Tabel 1.1. Data Jumlah Kunjungan Wisata

No	Wisata Sejarah	2018	2019
1	Museum Trowulan	57.710	37.592
2	Makam Troloyo	428.607	433.276
3	Candi Brahu	21.723	14.714
4	Candi Bajang Ratu	22.801	15.057
5	Candi Tikus	26.634	16.598

Sumber: Data Pengunjung Dinas Pariwisata

Kurangnya promosi pada tempat pariwisata di Trowulan menyebabkan rendahnya kunjungan wisatawan, dibandingkan dengan daya Tarik pariwisata yang berada di daerah Pacet dan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Menurut data dari Disporabudpar Kabupaten Mojokerto, aksesibilitas di Trowulan masih kurang. Hal ini menjadikan wisatawan sulit mendapatkan kemudahan dan kenyamanan ketika berwisata di Trowulan.

Tidak hanya pengembangan pelayanan yang diperhatikan, pelayanan yang memuaskan dan baik berperan penting untuk menarik dan meningkatkan jumlah wisatawan. Kepuasan wisatawan terhadap suatu obyek wisata bergantung pada daya tarik, pengembangan dan pelayanan yang baik. Apabila wisatawan tidak menerima pelayanan dengan baik maka akan timbul kekecewaan yang akan diceritakan kepada

orang lain. Jika hal ini terjadi, maka akan mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian terkait pengembangan pada kawasan situs bersejarah di Trowulan. Oleh karena itu peneliti membuat judul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Destinasi Wisata Peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto Untuk Meningkatkan Kunjungan Wisatawan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pengembangan pada destinasi wisata peninggalan Kerajaan Majapahit dalam meningkatkan wisatawan yang berkunjung?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan pengembangan destinasi wisata sejarah Kerajaan Majapahit dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan?

B. LANDASAN TEORITIS

1. Teori Kebijakan

Menurut pakar kebijakan publik mengartikan bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa kebijakan wajib dilakukan dan apa manfaat bagi kehidupan masyarakat harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan mempunyai manfaat yang besar bagi warga dan ada dampak kecil yang sebaiknya tidak mendatangkan persoalan yang sangat merugikan. Walaupun demikian sesuatu pasti ada yang dirugikan dan ada pula yang diuntungkan. Disini peran pemerintah yang harus bijaksana untuk menetapkan suatu kebijakan (Thomas Dye, 1992).

Ada tiga model yang diusulkan oleh Thomas R. Dye, yaitu model demokratis, model strategis, dan model pengamatan terpadu. Terkait dalam organisasi, kebijakan menurut George R. Terry yang berada dalam bukunya berjudul *Principles of Management* merupakan suatu pedoman yang menyeluruh baik tulisan maupun lisan yang dapat

memberikan suatu batas umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan oleh pemimpin (Terry, 1964).

Menurut Bridgeman dan Davis (Suharto, 2007:5) menyebutkan bahwa kebijak publik memiliki tiga dimensi yang saling berkesinambungan, yaitu sebagai tujuan, sebagai perilaku yang legal atau sah secara hukum dan sebagai hipotesis.

Charles Lindblom (1968) dalam Wahab (1997) menyatakan bahwa pembuatan kebijakan publik adalah proses politik yang kompleks dan analitis yang tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya serta batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang tidak pasti. Serangkaian kekuatan yang tidak begitu kompleks itulah yang disebut sebagai pembuatan kebijakan publik yang akan membuahkan hasil yang disebut kebijakan. Kebijakan ialah suatu fenomena kompleks terdiri dari beberapa keputusan yang dibuat oleh individu dan organisasi pemerintah (Muhlis Madani, 2011).

Menurut Dye Richard Rose (Winarno, 2014:20) menyatakan bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan beserta konsekensi-konsekuensinya bagi yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup subtansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). William N. Dunn mengungkapkan bahwa istilah evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing menunjukkan kepada aplikasi yang beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup kesimpulan, klarifikasi, penyesuaian, dan perumusan masalah.

Sedangkan menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu:

- a) Untuk menentukan konsekuensi yang dikeluarkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- b) Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari suatu kebijakan yang berdasarkan standar atau kriteria yang sudah ditetapkan.

Menurut William N. Dunn evaluasi kebijakan memiliki dua aspek yang sangat berhubungan yaitu penggunaan berbagai macam metode untuk memeriksa hasil kebijakan publik dan program serta aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Selanjutnya Dunn membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga yang berdasarkan oleh waktu evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan dan sesudah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan disebut dengan evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan disebut evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi dampak pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau yang biasa disebut sebagai evaluasi sumatif.

3. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), diantaranya yaitu:

- a) Evaluasi Semu (*Pseudo Evaluation*)

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif guna menghasilkan informasi yang benar dan bisa dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa ada usaha untuk mempertanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil tersebut. Asumsi utama dari evaluasi semu ialah suatu ukuran tentang manfaat atau nilai yang dapat dibuktikan sendiri (*self evident*) atau tidak kontroversial.

- b) Evaluasi Formal

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif yang berguna mewujudkan informasi yang benar dan bisa dipercaya mengenai hasil kebijakan tetapi megevaluasi hal tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang sudah diumumkan secara formal oleh pembuat

kebijakan dan administrator program. Asumsi yang paling utama dari evaluasi formal ialah tujuan dan target dapat diumumkan secara formal dan meruakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.

c) Evaluasi Keputusan Teoritis

Pendekatan yang menggunakan metode deskriptif yang berguna untuk menghasilkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai pelaku kebijakan. Asumsi evaluasi teoritis keputusan merupakan tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan baik yang dinyatakan secara formal maupun tersembunyi yang memiliki ukuran layak terhadap manfaat atau nilai kebijakan program.

4. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata

Saat ini pariwisata adalah sektor terpenting dalam bidang ekonomi negara atau daerah, karena pariwisata dapat menambah pendapatan negara atau daerah. Maka dari itu pemerintah harus bisa mengembangkan tempat pariwisata menjadi lebih baik atau lebih berkembang agar dapat menarik wisatawan.

Menurut Winarno (2014) evaluasi berguna untuk mengetahui adanya penyimpangan yang terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

Menurut Wibawa dalam Nugroho, evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengetahui tentang pola hubungan antar berbagai dimensi realita yang sedang diamati dan evaluasi bisa untuk mengidentifikasi masalah, kondisi dan faktor. Dalam hal ini pelaku birokrasi bisa mengetahui tindakannya sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dan dapat melihat output akan benar-benar sampai kepada sasaran kebijakan atau justru ada penyimpangan. Dengan evaluasi dapat

diketahui apa akibat yang diterima oleh sosial ekonomi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Wibowo (2010) mengatakan bahwa pengembangan adalah usaha yang berguna untuk memajukan suatu objek menjadi lebih bagus dan lebih baik yang mempunyai hasil untuk kepentingan bersama.

Evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata adalah kegiatan yang berguna untuk mengidentifikasi masalah, kondisi dan faktor pengembangan pariwisata yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan suatu objek pariwisata menjadi lebih bagus dan lebih baik guna menarik kunjungan wisatawan agar dapat menambah pendapatan negara atau daerah.

C. METODE

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif yang mana peneliti akan meneliti sesuatu fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dan dapat diteliti dan menghasilkan sesuatu data.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pengamatan penelitian yang terfokuskan dalam beberapa indikator-indikator saja, jadi penelitian bisa terarah terhadap tujuan utamanya agar tidak terjadi pembahasan yang terlalu luas dan pada akhirnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi judul penelitian. Sehingga peneliti bisa mendapatkan yang lebih mendalam dan fokus terhadap penelitian ini.

Berdasarkan teori Winarno dan Wibawa, Evaluasi kebijakan pengembangan pariwisata adalah kegiatan yang berguna untuk mengidentifikasi masalah, kondisi dan faktor pengembangan pariwisata yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk memajukan suatu objek pariwisata menjadi lebih bagus dan lebih baik guna menarik

kunjungan wisatawan agar dapat menambah pendapatan negara atau daerah.

Penelitian ini berfokus untuk melihat keberhasilan kebijakan pembangunan dengan ukuran akhir adalah tingkat kunjungan wisatawan dengan pengukuran kriteria menurut Wibawa dalam Nugroho mempunyai empat kriteria, yaitu tingkat efisiensi, tingkat kinerja, tingkat keluaran, dan tingkat penyimpanan.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat yang digunakan untuk proses pengambilan data dan informasi yang dibutuhkan untuk fokus penelitian. Yang

menjadi tempat penelitian adalah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan wisata sejarah peninggalan kerajaan Majapahit di Trowulan Kabupaten Mojokerto. Alasan pemilihan lokasi ini berdasarkan pada keinginan peneliti untuk menganalisa objek wisata ini serta faktor apa saja yang akan memengaruhi dalam pengelolaan dan pengembangan objek di wisata sejarah Kerajaan Majapahit.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Berikut data yang menjelaskan mengenai jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020-2022:

Tabel 4.1. Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2020-2022

No.	Situs Peninggalan	2020	2021	%	2022	%
1	Makam Troloyo	37.558	111.295	20%	310.821	18%
2	Museum Majapahit	4.930	4.675	-5,2%	21.708	36%
3	Candi Bajang Ratu	2.061	4.665	13%	8.253	76%
4	Candi Brahu	2.125	4.790	13%	8.708	81%
5	Candi Tikus	2.202	4.802	12%	7.157	49%

Sumber: Diolah penulis

Berdasarkan tabel diatas, tingkat wisatawan di objek wisata Kerajaan Majapahit sudah mulai ada peningkatan. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk memaksimal pengembangan objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit. Sudah ada peningkatan kunjungan walaupun belum sempurna. Peningkatan pengunjung yang ada pada objek wisata peninggalan Kerajaan Majapahit ada yang sudah mengalami peningkatan seperti pada wisata Makam Troloyo sudah mulai naik, tetapi di Museum Majapahit tahun 2021 mengalami penurunan dan naik lagi pada tahun 2022. Di situs peninggalan 3 candi mengalami kenaikan tetapi hanya sedikit-sedikit.

Tingkat keberhasilan dari evaluasi kebijakan pengembangan destinasi wisata peninggalan Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kunjungan wisatawan akan dianalisis dengan menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Wibawa

dalam Nugroho serta faktor penghambat dan pendukungnya.

Seperti teori yang telah disampaikan oleh Wibawa dalam Nugroho dalam membahas tentang kebijakan pengembangan destinasi wisata sejarah Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto menggunakan pedoman dari teori Wibawa dalam Nugroho dengan menggunakan pengukuran Kriteria Evaluasi Kebijakan, diantaranya:

1. Mengukur Tingkat Efisiensi Suatu Kebijakan

Pengelolaan wisata Kerajaan Majapahit membutuhkan anggaran besar untuk pengembangan yang berguna menarik perhatian wisatawan. Pengelolaan wisata sangat membutuhkan anggaran untuk dukungan berjalannya program. Anggaran pengelolaan wisata sejarah Kerajaan Majapahit bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur serta dari APBD

Kabupaten Mojokerto. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 98 yang menerangkan bahwa anggaran pengelolaan cagar budaya berasal dari APBN dan APBD.

Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang sudah dibentuk oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat hukum adat. Sehingga bisa dikatakan bahwa situs Peninggalan Kerajaan Majapahit merupakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Pengelolaan situs Kerajaan Majapahit menjadi misi pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, yang sudah tertuang pada Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto tahun 2012-2032.

Bidang pariwisata harusnya menjadi salah satu pengembangan yang harus diutamakan agar bisa ditangani secara serius. Karena sektor pariwisata mempunyai banyak manfaat, selain untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD) juga bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat.

2. Tingkat Kinerja

Pada kriteria tingkat kinerja menggunakan ukuran tingkat kunjungan wisatawan dan kontribusi yang diberikan ke PAD. Berdasarkan pada tabel 4.6 jumlah peningkatan wisatawan pada wisata situs peninggalan Kerajaan Majapahit. Tingkat kunjungan wisatawan Makam Troloyo pada tahun 2020 ke 2021 meningkat 20% dan pada tahun 2022 meningkat hanya 18%. Pada Museum Majapahit dari tahun 2020 ke 2021 menurun 5,2%, tetapi pada tahun 2022 meningkat hingga 36% kunjungan. Candi Bajang Ratu dari tahun 2020 ke 2021 meningkat 13% dan tahun 2022 meningkat 76%. Pada Candi Brahu dari tahun 2020 ke 2021 meningkat 13% dan pada tahun 2022 meningkat hingga 81%. Sedangkan pada Candi Tikus dari tahun 2020 ke 2021 meningkat hanya 12%, pada tahun 2022 meningkat 49%. Tingkat kunjungan

wisatawan di masing masing objek pada tahun 2021 masih ada yang menurun. Kenaikan wisatawan belum maksimal. Pada Candi Tikus kenaikannya hanya beberapa persen saja.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sedang melakukan upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di wisata sejarah Kerajaan Majapahit guna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Bukan hanya itu saja, pengunjung juga bisa menambah ilmu dalam mengunjungi wisata sejarah Kerajaan Majapahit. Pemasaran pariwisata harus berpegang teguh dalam pengelolaan, agar banyak pengunjung mengambil keputusan untuk mengadakan perjalanan wisata. Dalam hal ini melakukan promosi merupakan tindakan yang strategis untuk menarik kunjungan wisatawan.

3. Tingkat Keluaran

Kriteria tingkat keluaran di ukur dari seberapa besar pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah untuk pengembangan guna meningkatkan wisatawan. Pada tabel 4.1. progres pengembangan yang dilakukan pemerintah pada objek wisata Makam Troloyo pada tahun 2021 dilakukan pembangunan tempat peristirahatan yang digunakan untuk wisatawan untuk istirahat dan pada tahun 2022 ada progres pengembangan yang dilakukan pembangunan penyangga terik matahari dan hujan. Untuk Museum Majapahit pada tahun 2022 diadakan pementasan Seni Budaya, seperti Reog Ponorogo, Jaranan dan sebagainya yang dilaksanakan di pelataran Museum Majapahit. di Candi Brahu pada tahun 2022 ada pengadaan *Car Free Day* yang dilakukan setiap hari Minggu dan pelaksanaannya terletak pada di depan area Candi Brahu.

Pelaksanaan *Car Free Day* ini telah dilakukan sampai tahun ini. Pada Candi Bajang Ratu tahun 2020 ada konser piano tunggal yang di mainkan oleh Ananda Sukarlan, dilaksanakan di Pelataran Candi

Bajang Ratu dan pada tahun 2022 diadakan pembangunan tambahan Gazebo. Candi Tikus pada tahun 2022 hanya ada pengembangan pada lahan parkir saja. Pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya hal kecil saja dan belum ada penambahan objek wisata yang akan menarik perhatian wisatawan.

Pembangunan sarana dan prasarana di destinasi wisata sangatlah efektif untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Suatu destinasi wisata harus mempunyai fasilitas untuk kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar wisatawan yang berkunjung dapat merasakan kenyamanan. Berdasarkan hasil observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti, sarana dan prasarana yang ada di wisata peninggalan Kerajaan Majapahit seperti gazebo, kamar mandi, tempat sampah, dan papan informasi sudah ada serta layak untuk dipergunakan.

4. Tingkat Penyimpangan

Kriteria tingkat penyimpangan menggunakan kriteria ukuran Pelaksanaan Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah. Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Baparekraf Tahun 2020-2024 memiliki tujuan, yaitu Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional dengan indikator tujuan yaitu nilai devisa pariwisata, kontribusi PDB Pariwisata dan nilai ekspor produk ekonomi kreatif. Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian, yaitu meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Berdasarkan kondisi di lapangan, menunjukkan bahwa:

1. Kenaikan anggaran pengembangan yang diberikan masih kecil dan terkadang per tahunnya berkurang. Seharusnya jika ingin pengembangan objek wisata berjalan anggaran pengembangan yang di berikan per tahun harus bertambah.

2. Kunjungan wisatawan di objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit sudah ada yang bertambah per tahunnya, tetapi kenaikan kunjungan tidak signifikan dan belum ada lonjakan wisatawan yang berkunjung.
3. Pengembangan pada objek wisata sejarah kerajaan Majapahit juga belum optimal, hanya ada pengembangan yang biasa saja seperti tambahan gazebo dan lain sebagainya.

Berdasarkan kondisi di lapangan, maka sasaran strategis Renstra belum dilaksanakan secara maksimal. Masih banyak pengembangan objek wisata yang belum sesuai dan berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, peneliti mengemukakan bahwa dalam evaluasi kebijakan pengembangan di objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto, maka bisa ditarik kesimpulan dengan 4 indikator menurut Wibawa dalam Nugoroho pada ukuran kriteria kebijakan dalam ukuran besarnya anggaran, tingkat kunjungan wisatawan, besarnya pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, sebagai berikut:

- a) Dalam ukuran besarnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk pengembangan wisata yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana untuk kenyamanan wisatawan. Anggaran pemerintah sangat penting untuk pembangunan objek wisata guna untuk menambah sesuatu untuk menarik kunjungan wisatawan. Tetapi pemerintah setempat belum memberikan anggaran yang maksimal pada objek wisata peninggalan Kerajaan Majapahit.
- b) Dalam ukuran tingkat kunjungan wisatawan tingkat kunjungan di objek wisata Kerajaan Majapahit sudah mulai ada peningkatan tetapi belum maksimal. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan pengembangan objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit.

Sudah ada peningkatan kunjungan walaupun belum sempurna.

- c) Dalam ukuran besarnya tingkat pengembangan Pengembangan objek wisata tidak bisa lepas dari adanya sebuah pembangunan dalam sektor sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan jumlah pengunjung dalam suatu tempat wisata. Usaha pemerintah untuk pengembangan wisata di peninggalan Kerajaan Majapahit belum bisa di katakan besar, karena pengembangan yang dilakukan masih belum sempurna.
- d) Dalam ukuran pelaksanaan kebijakan pemerintah, pemerintah telah melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan tetapi belum semua terlaksana, yang sudah terlaksana hanya penganggaran yang sudah dipergunakan untuk keperluan yang sudah direncanakan.

Faktor penghambat dalam pengembangan wisata sejarah Kerajaan Majapahit, antara lain:

- a) Anggaran pengembangan dari Pemerintah Kabupaten masih kurang.
- b) Objek pengembangan yang dilaksanakan hanya pembangunan kecil tidak ada pengembangan yang lain.
- c) Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah dan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung penambahan jumlah wisatawan.

Dalam hal ini pemerintah belum bisa mengatasi pengembangan wisata untuk menaikkan tingkat kunjungan wisatawan. Selain itu ada juga faktor pendukung, yaitu aksesibilitas untuk menuju ke tempat wisata sudah mulai membaik dan pemerintah masih memberikan anggaran untuk pengembangan meskipun pemerintah memberi hanya sedikit anggaran.

Dengan adanya hambatan tersebut, langkah pemerintah yang harus dilakukan dengan memberikan perhatian lebih pada objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit dan menambahkan lagi anggaran agar bisa

melakukan pengembangan yang lebih baik untuk menarik wisatawan.

2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit di Kabupaten Mojokerto, maka disarankan hal hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga melakukan penambahan pada anggaran pengembangan di wisata sejarah Kerajaan Majapahit agar bisa digunakan untuk mengembangkan objek wisata yang lebih baik untuk menarik kunjungan wisatawan.
- b) Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga diharapkan bisa melakukan promosi secara maksimal kepada masyarakat luas. Promosi bisa dilakukan di berbagai media dan bisa bekerja sama dengan pelaku usaha khususnya *travel agent*.
- c) Pemerintah diharapkan mampu mengadakan pengembangan di semua objek wisata. Pengembangan objek wisata yang maksimal akan mampu untuk menarik wisatawan berkunjung dan bisa membuat wisatawan itu akan kembali berkunjung. Pemerintah juga bisa menambahkan toko souvenir dan restoran agar wisatawan terasa nyaman saat berkunjung di objek wisata sejarah Kerajaan Majapahit.
- d) Pemerintah harus mengadakan acara atau mengadakan pembangunan yang dilakukan di sekitaran peninggalan Kerajaan Majapahit guna untuk memperlancar pengembangan dan penambahan wisatawan.

REFERENSI

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Edwards III, & George, C. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta: Pustaka Sinar Utama.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, R. (2022). Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Objek Wisata Sumpah Sati Bukik Marapalam (Puncak Pato) Oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. *Disertasi*. Universitas Islam Riau.
- Ibrahim, R. M. (2022). Evaluasi Pengembangan Pariwisata Bandar Bakau Oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. *Disertasi*. Universitas Islam Riau.
- Miles, B. M., & Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong, & Lexy, J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, & Riant. D. (2003). *Kebijakan Publik (Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Muharam, S., Andri, A., & Harun, A. (2022). Kebijakan Strategi Pengembangan Wisata di Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Trias Politika*, 6(2), 164–184.